

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pendidikan mempunyai peranan yang strategis dalam menentukan kualitas suatu bangsa. Bangsa yang berkualitas ditandai dengan pendidikan yang berkualitas dari semua segi. Baik dari segi fasilitas, sumber daya pengajar, kurikulum, pendanaan dan kebijakan. Untuk hal yang terakhir, kebijakan berperan secara makro dalam pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Dalam UU No 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Tentu menyelenggarakan pendidikan yang bermutu adalah tanggung jawab pemerintah dan kebijakan pendidikan yang merata adalah salah satu caranya.

Di Indonesia sendiri semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan telah diatur dalam Undang-Undang. Dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 tentang sistem pendidikan nasional ditegaskan bahwa “Setiap Warga Negara Berhak Mendapat Pendidikan.” Indonesia sebagai negara hukum menekankan pendidikan sebagai landasan pembangunan nasional, namun pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai kendala dan kualitasnya semakin menurun (Ramadhan 2023). Penyelenggaraan pendidikan sebaiknya dilaksanakan dengan membutuhkan penyesuaian terhadap kondisi yang ada. Artinya pendidikan merupakan wujud kebudayaan dalam kehidupan masyarakat dan merupakan bagian darinya, sehingga apabila pendidikan dilakukan selaras dengan kondisi masyarakat maka terdapat kemungkinan-kemungkinan inovatif dan kreatif sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat (Hartati and Hariyono 2020). Adanya mutu pendidikan yang baik, diharapkan mampu menjadi sumber pembangunan untuk mewujudkan bangsa yang maju. Pendidikan tidak hanya menjadi agen perubahan bagi generasi muda penerus bangsa, namun juga harus menjadi agen produsen yang membawa perubahan sejati.

Standar pendidikan bukan sekedar pendidikan formal, namun segala bentuk pendidikan harus mampu merombak anak bangsa agar mereka memiliki kemampuan yang nantinya akan menjadi bekal mereka untuk meneruskan bangsa ini (Yuliany et al. 2023). Pendidikan perlu diubah menjadi pendidikan yang inovatif dan berkualitas agar mampu mendorong kreativitas warga masyarakat terutama generasi muda penerus bangsa, menumbuhkan rasa keingintahuan yang mereka miliki sebagai inovator yang kelak akan berperan penting dalam menerapkan konsep-konsep SDGs.

Adanya *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan rencana aksi global dengan tujuan untuk mengakhiri berbagai permasalahan di dunia. Salah satu prinsipnya yaitu *universality* yang diartikan bahwa semua Negara harus patuh dan melaksanakan prinsip-prinsip SDGs yang 2 telah ditetapkan agar tidak ada lagi yang disebut sebagai Negara tertinggal. Saat ini, dalam upaya mencapai 17 tujuan dari pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*

Goals/SDGs) yang telah ditetapkan oleh PBB, kesetaraan pendidikan menjadi landasan kunci untuk mewujudkan agenda pembangunan global. SDGs sebagai agenda global dinilai sangat komprehensif dan ambisius dengan 14 tujuan dan 169 target yang akan menuntun dunia dalam mencapai sebuah pembangunan berkelanjutan. Sebelum bergulirnya SDGs pada September 2015, Indonesia bersama dengan Negara-negara lain baru saja menyelesaikan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals*) atau MDGs yang telah menjadi acuan pembangunan Indonesia sejak tahun 2000. MDGs menfokuskan targetnya pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat global melalui pengentasan kemiskinan dan kelaparan (Armida Alisjahbana, 2018). Ke-17 pilar yang membentuk pilar 1-6 merupakan beberapa program utama dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang sedang berjalan. Sementara itu, pilar 7-17 merupakan landasan baru yang menjadi acuan program. Hal ini mencakup hal-hal berikut: (1) tidak ada kemiskinan; (2) tidak ada kelaparan; (3) kesehatan dan kesejahteraan yang baik; (4) pendidikan berkualitas; (5) kesetaraan gender; (6) air bersih dan sanitasi; (7) energi yang terjangkau dan bersih; (8) pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) industry, inovasi, dan infrastruktur; (10) berkurangnya ketimpangan; (11) kota dan komunitas yang berkelanjutan; dan (12) kemitraan untuk tujuan; (13) aksi terhadap perubahan iklim; (14) biota laut dan pesisir; (15) kehidupan terrestrial; (16) lembaga keadilan, perdamaian, dan kelembagaan yang kuat; (17) aksi perubahan iklim (Thaharah & Batubara, 2023).

Ke-17 pilar yang membentuk SDGs terdiri dari berbagai aspek pembangunan berkelanjutan. Salah satu yang paling relevan dengan penelitian ini adalah SDG 4: Pendidikan Berkualitas, yang bertujuan untuk "menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua" (UN, 2015). SDG 4 memiliki beberapa indikator utama, adapun yang membahas terkait pendidikan yaitu SDG 4.2 yaitu Menjamin bahwa semua anak laki-laki dan perempuan memiliki akses ke pengembangan anak usia dini yang berkualitas, pendidikan prasekolah, sehingga mereka siap untuk pendidikan dasar. SDG 4.2 yang menekankan akses terhadap pendidikan usia dini yang berkualitas memiliki kaitan erat dengan penelitian ini. Pendidikan inklusif yang diterapkan di Universitas Hasanuddin merupakan bentuk implementasi dari prinsip ini dalam konteks pendidikan tinggi. Dengan adanya kebijakan afirmasi penerimaan mahasiswa disabilitas, Unhas berupaya memastikan bahwa individu dengan keterbatasan fisik atau kebutuhan khusus mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan tinggi. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh Universitas Hasanuddin sejalan dengan visi SDG 4 dalam memastikan pendidikan yang merata bagi semua kelompok masyarakat.

Selain SDG 4, SDG 10 yaitu Mengurangi Ketimpangan, khususnya target 10.2, juga sangat relevan dengan penelitian ini. SDG 10.2 menargetkan "memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi semua orang, tanpa memandang usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, asal,

agama, atau status ekonomi atau lainnya" (UN, 2015). Implementasi kebijakan afirmasi di Universitas Hasanuddin dapat dipahami sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan pendidikan yang dialami oleh kelompok disabilitas. Dengan menerima mahasiswa disabilitas melalui jalur khusus, universitas berusaha meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi dan memberdayakan mereka agar dapat berpartisipasi secara setara dalam kehidupan akademik dan profesional.

Komitmen Pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar warga Negara sejalan dengan kesepakatan pembangunan global sehingga pemerintah memiliki kewajiban dalam melaksanakannya. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan agar tidak terjadi ketimpangan yang dapat menimbulkan hambatan pelaksanaan pemenuhan hak-hak dasar warga Negara. Hak-hak tersebut terdiri dari beberapa aspek, salah satu yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hak untuk mendapatkan pendidikan.

Salah satu alat yang penting dalam mempromosikan kesetaraan pendidikan adalah kebijakan pendidikan yang inklusif dan progresif. Kebijakan-kebijakan ini harus dirancang untuk dapat memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama dan setara terhadap pendidikan, tanpa diskriminasi atau hambatan yang tidak masuk akal. Kebijakan pendidikan inklusif adalah satu kebijakan yang bertujuan agar pendidikan dapat menjangkau semua kalangan. Pendidikan inklusi merupakan pendekatan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan belajar semua anak, remaja dan orang dewasa yang difokuskan secara spesifik kepada mereka yang rawan dan rapuh terpinggirkan dan terabaikan. Pendidikan mempunyai arti bahwa sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa atau kondisi lain, termasuk anak penyandang cacat, anak-anak berbakat (*gifted children*), pekerja anak dan anak jalanan, anak di daerah terpencil, anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas dan anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan dari kelompok masyarakat Unesco (1994).

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi. Pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwasannya Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus yang harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan, dan kenyamanan. Sejalan dengan pernyataan diatas, pemerintah Negara Indonesia sudah mengeluarkan regulasi yang sejalan terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana berupa akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Dalam regulasi tersebut, terdapat pada BAB II tentang Penyediaan Akomodasi Yang Layak pada Pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwa penyediaan sarana dan prasarana melalui pengadaan dan/atau pemeliharaan

sarana dan prasarana yang memenuhi aspek aksesibilitas bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 juga membahas tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Tujuan dari pendidikan inklusif di sini adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik tanpa terkecuali untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya serta mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Kemudian pemerintah juga membuat peraturan untuk perguruan tinggi agar dapat membantu mahasiswa-mahasiswa difabel untuk mengembangkan potensinya yang di tetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi. Tujuan dari peraturan ini diantaranya memperluas akses dan kesempatan bagi warga negara penyandang difabel untuk mengikuti pendidikan tinggi serta menyediakan aksesibilitas bagi penyandang difabel yang disesuaikan dengan kebutuhannya dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan berbagai aktivitas lainnya di perguruan tinggi sehingga mereka dapat mencapai kinerja dan prestasi secara optimal.

Meskipun landasan hukum yang kuat telah ditetapkan, tantangan dalam penerapan pendidikan inklusif masih terlihat di berbagai perguruan tinggi, di mana banyak dari mereka belum sepenuhnya menyediakan fasilitas dan dukungan yang diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip pendidikan inklusif sudah tertera dalam undang-undang dan konstitusi, realisasi di lapangan masih memerlukan perhatian dan upaya ekstra dari semua pihak terkait.

Menurut Soleh (2016), eksistensi penyandang disabilitas pada sebuah perguruan tinggi masih dinilai sangat minim. Perguruan tinggi di Indonesia masih dianggap belum bersahabat dan merangkul para penyandang disabilitas yang ingin mengenyam pendidikan tinggi, sehingga bagi mereka (penyandang disabilitas) yang ingin mendapatkan pendidikan tinggi harus lebih berusaha dengan keras untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Perguruan tinggi yang inklusif kepada penyandang disabilitas di Indonesia masih sangat jarang. Hal ini dikarenakan banyak dari perguruan tinggi di Indonesia yang merasa belum siap menyediakan fasilitas untuk menunjang proses pembelajaran dan cenderung masih mengkhawatirkan kemampuan akademik karena adanya keterbatasan yang dimiliki (Soleh, 2016).

Partisipasi penyandang disabilitas pada pendidikan, khususnya pada perguruan tinggi di Indonesia dinilai masih sangat minim sekali. Hal ini dibuktikan dari data Kementerian Sosial RI Tahun 2012 yang menunjukkan hanya 8,455 orang penyandang disabilitas yang dapat mengenyam pendidikan pada perguruan tinggi (Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktoral) (Prasetyo, 2014).

Sedangkan data dari BPS 2020 yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 2,8% saja penyandang disabilitas yang berhasil menamatkan pendidikan pada perguruan tinggi, sedangkan untuk mereka yang non-disabilitas memiliki persentase partisipasi lebih tinggi pada perguruan tinggi yakni sebesar 9,48% (Jayani, 2020). Dari hal tersebut sudah terlihat bahwa memang terdapat kesenjangan antara partisipasi pada perguruan tinggi pada penyandang disabilitas jika dibandingkan dengan partisipasi dari non-disabilitas. Hal ini disebabkan oleh adanya bentuk eksklusi sosial terhadap penyandang disabilitas yang terjadi di masyarakat dan berdampak pada bidang pendidikan. Terjadinya proses eksklusi sosial pada penyandang disabilitas dikarenakan adanya permasalahan terkait hal kognitif dan kemampuan adaptasi dari penyandang disabilitas terkait dengan lingkungan pendidikan umum, selain itu permasalahan pada proses interaksi juga dianggap menjadi permasalahan utama (Roslina & Rahayu, 2018). Proses eksklusi sosial inilah yang pada akhirnya menjadikan kecilnya kesempatan untuk penyandang disabilitas dapat berpartisipasi untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya (Kristiyanti, 2018).

Perlu kesadaran dari setiap masing-masing universitas agar lebih sensitif terhadap difabel untuk melakukan pemenuhan kebutuhan dan aksesibilitas bagi mahasiswa difabel. Universitas sebagai lembaga pendidikan perguruan tinggi seharusnya berani memberikan sebuah teladan kepada masyarakat luas dalam menciptakan suasana yang ramah bagi difabel. Masih sangat minim universitas-universitas di Indonesia yang benar-benar peduli untuk pemenuhan kebutuhan dan aksesibilitas bagi difabel, ini tandanya belum ada niat atau iktikad dari pemegang kebijakan serta praktisi dan akademisi untuk mengimplementasikan kebijakan yang dibuat.

Universitas Hasanuddin (Unhas), sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia, berkomitmen untuk merancang pendidikan inklusif yang memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi semua individu yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Dengan fokus pada kualitas pendidikan, Unhas tidak hanya berupaya mencetak lulusan yang kompeten, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap mahasiswa, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang secara akademik dan personal, tanpa adanya diskriminasi.

Universitas Hasanuddin (Unhas) menyediakan berbagai jalur penerimaan mahasiswa baru yang dirancang untuk menjangkau beragam calon mahasiswa dari berbagai latar belakang. Jalur penerimaan tersebut mencakup Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), Jalur Mandiri, serta program khusus seperti jalur afirmasi untuk mahasiswa dari daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), dan jalur afirmasi bagi penyandang disabilitas. Selain itu, Unhas juga menerima mahasiswa internasional melalui program seperti Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB). Setiap jalur dirancang dengan tujuan memberikan kesempatan yang luas dan adil kepada berbagai kelompok masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi berkualitas di Unhas.

Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pendidikan inklusif, Universitas Hasanuddin telah mengambil langkah progresif dengan merancang kebijakan afirmasi khusus bagi penyandang disabilitas. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang setara untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa menghadapi hambatan diskriminasi. Dalam implementasinya, Unhas tidak hanya menyediakan jalur penerimaan afirmasi, tetapi juga memastikan tersedianya fasilitas yang mendukung, seperti aksesibilitas fisik di kampus, layanan pendampingan, dan teknologi adaptif. Pendekatan ini mengedepankan prinsip berbasis hak asasi manusia, menempatkan kebutuhan mahasiswa sebagai prioritas, serta mendorong terciptanya lingkungan belajar yang inklusif dan ramah bagi semua individu.

Melalui kebijakan afirmasi disabilitas, Unhas berupaya menciptakan sistem pendidikan yang merangkul keberagaman, memastikan bahwa setiap mahasiswa, terlepas dari latar belakang atau kondisi fisiknya, dapat berkembang secara akademik dan personal. Penelitian ini berusaha menganalisis bagaimana kebijakan afirmasi di Universitas Hasanuddin mencerminkan prinsip-prinsip dari SDG 4.5 dan SDG 10.2. Fokusnya adalah menilai efektivitas kebijakan ini dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya. Dengan memahami bagaimana kebijakan ini diimplementasikan, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat inklusi pendidikan bagi penyandang disabilitas, sehingga tujuan dari pembangunan berkelanjutan dalam sektor pendidikan dapat tercapai dengan lebih optimal.

Tabel I. 1 Nama-Nama Mahasiswa baru Program Sarjana (S1) Jalur Seleksi Mandiri Afirmasi Disabilitas

2023/2024			
No.	Nomor Ujian	Nama	Program Studi
1	231132010047	Muhammad Girandy Kusuma Tryanda	Ilmu Komunikasi
2	231702010070	Muh. Ilham	Ilmu Komunikasi
3	231702010002	Megawati	Sastra Indonesia
4	231702010004	Fitrah Ramadhan	Sastra Indonesia
2024/2025			
No.	Nomor Ujian	Nama	Program studi
1	241612010136	A.Muh. Zulfikar Afdhal	Manajemen
2	241702010066	A.Hijratul Resky	Ilmu Komunikasi
3	241702010068	Muhammad Alifarqad	Ilmu Komunikasi

		Rabbani Bachtiar	
4	241702010069	Sabilu Rusdy	Administrasi Publik
5	241702010067	Reski Pangestu Saputra	Pariwisata
6	241792010004	Megarezki	Sastra Indonesia
7	241412110003	Muhammad Ilham Arif. S	Teknologi Industri Pertanian
8	241542310006	Ririn Ramadhani Caturmulya Putri	Peternakan
9	241132010065	Rismayanti	Kesehatan Masyarakat
10	241132110017	Alya Alfitah	Ilmu Gizi

Sumber : Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 06870/UN4.1/KEP/2024 dan 08296/UN4.1/KEP/2024

Univeritas Hasanuddin juga telah mendirikan Pusat Disabilitas pada Mei 2023 untuk mendukung mahasiswa penyandang disabilitas dan mempromosikan inklusivitas, yang sejalan dengan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Inisiatif tersebut mencakup proses penerimaan khusus dan kampanye kesadaran, yang menunjukkan komitmen Unhas untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif bagi semua mahasiswa. Kehadiran mereka menegaskan dedikasi Unhas dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah dan mendukung bagi semua individu. Langkah ini tidak hanya memperluas kesempatan belajar, tetapi juga memperkuat visi Unhas dalam mengedepankan keberagaman dan kesetaraan di dunia akademik. Pembentukan Pusat Disabilitas ini diatur dalam Surat Keputusan Rektor Unhas nomor 05613/UN4.1/KEP/2023, yang menekankan komitmen universitas untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua golongan, termasuk penyandang disabilitas

Kampus yang inklusif adalah kampus yang ramah bagi semua orang, tanpa terkecuali. Di kampus yang inklusif, setiap orang merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Aksesibilitas untuk mahasiswa disabilitas di Universitas Hasanuddin masih sangat jauh dari kampus yang inklusif. Hal tersebut dapat kita lihat dari sarana dan prasarana di Universitas Hasanuddin yang masih belum dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa disabilitas. Aksesibilitas sangatlah penting dalam membangun kemandirian teman-teman disabilitas agar mereka tidak selalu bergantung pada orang lain, dan dapat membuat disabilitas jauh dari stigma “orang yang dikasihani”.

Setelah melakukan wawancara awal dengan mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas Hasanuddin, teridentifikasi beberapa kendala utama yang mereka hadapi, yang dapat dianalisis melalui teori Edward III. Pertama, kurangnya kesadaran (awareness) menjadi masalah signifikan, di mana pendampingan bagi mahasiswa yang kesulitan mengakses konten, terutama konten visual, masih perlu ditingkatkan. Hal ini terkait dengan aspek komunikasi

dalam teori Edward III, di mana penyampaian informasi yang jelas dan dukungan yang memadai sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan.

Selanjutnya, mahasiswa juga mengeluhkan tentang fasilitas fisik yang belum memadai. Mereka mengusulkan perbaikan sarana dan prasarana, seperti penambahan ramp untuk akses kursi roda, blok pemandu, dan pegangan besi untuk membantu mobilitas. Ini menunjukkan perlunya perhatian terhadap sumber daya dalam teori Edward III, di mana fasilitas yang mendukung aksesibilitas fisik harus disediakan untuk memastikan mahasiswa disabilitas dapat belajar dengan nyaman.

Di sisi lain, tantangan dalam perubahan mindset di kalangan dosen dan mahasiswa mengenai pentingnya inklusivitas dalam pendidikan mencerminkan aspek disposisi dalam teori tersebut. Jika sikap dan pemahaman terhadap pendidikan inklusif dapat ditingkatkan, maka dukungan terhadap mahasiswa penyandang disabilitas juga akan semakin baik.

Terakhir, keberadaan prosedur yang rumit dalam akses layanan menunjukkan perlunya perbaikan dalam struktur birokrasi. Mahasiswa mengusulkan penyediaan bahan bacaan dalam format PDF dan juru bahasa untuk memfasilitasi komunikasi, yang menyoroti pentingnya sistem yang lebih sederhana dan responsif terhadap kebutuhan mereka.

Dengan memperkuat komitmen terhadap implementasi kebijakan yang mendukung tujuan SDGs, Universitas Hasanuddin tidak hanya berkontribusi pada upaya global mencapai pendidikan inklusif, tetapi juga berupaya menciptakan lingkungan kampus yang mencerminkan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas. Kombinasi dari peningkatan kesadaran, penyediaan sumber daya yang memadai, perubahan disposisi, dan perbaikan struktur birokrasi adalah langkah-langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti implementasi kebijakan SDGs dalam mewujudkan pendidikan inklusif dalam lingkup disabilitas dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pendidikan Inklusif di Universitas Hasanuddin.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul, Septianti and Rumzi, Samin and Rudi, Subiyakto (2021) dengan judul Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di kota tanjungpinang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengimplementasikan kebijakan Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pendidikan inklusif belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia, sarana prasarana yang belum memadai, serta pemahaman pelaksana yang belum sepenuhnya sesuai peran. Meskipun kebijakan ini diterima oleh pelaksana, komunikasi antar organisasi dan sosialisasi kepada masyarakat masih kurang. Selain itu, pengaruh lingkungan ekonomi, sosial, dan politik belum cukup mendukung, terutama karena kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Meylani, M. (2024). dengan judul Implementasi kebijakan Pendidikan Inklusif di satuan pendidikan di Kota Medan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif di sekolah dasar di Kota Medan belum berjalan dengan baik, dimana standar dan tujuan kebijakan belum jelas dan spesifik, serta sumber daya yang tersedia belum memadai untuk mendukung implementasi kebijakan ini. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini kurang serius dan kurangnya komunikasi antar aktor. Selain itu, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Taufik, A. N., & Rahaju, T. (2021) dengan judul Implementasi Kebijakan pendidikan Inklusif untuk mewujudkan kesetaraan belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus tingkat SMA di Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan pendidikan inklusif dalam mewujudkan kesetaraan belajar untuk PDBK tingkat SMA di Surabaya. Penelitian menggunakan teori Van Metter dan Van Horn, terdapat enam variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya yang dipakai, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hasil dari penelitian ini adalah meski kesetaraan belajar sudah di terapkan sejak lama, namun dapat dilihat bahwa kesetaraan belajar masih belum merata kepada para penyandang disabilitas, karena ditempatkan di sekolah khusus, sehingga kurang mendapatkan sosialisasi dengan teman sebayanya yang normal. Oleh karena itu dikeluarkannya kebijakan pendidikan inklusif yang diharapkan dapat memaksimalkan kesetaraan belajar tersebut, terutama bagi para PDBK di Surabaya.

Dari beberapa penelitian terdahulu, ditemukan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan sosial dan politik. Meskipun banyak penelitian telah membahas pendidikan inklusif pada tingkat dasar dan menengah, implementasi kebijakan afirmasi untuk mendukung mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi masih relatif kurang dieksplorasi. Universitas Hasanuddin sebagai salah satu perguruan tinggi yang telah mengadopsi kebijakan afirmasi bagi mahasiswa disabilitas menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mendukung pendidikan inklusif.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan SDGS Dalam Mewujudkan Pendidikan Unklusif di Universitas Hasanuddin (Studi Kasus : Afirmasi Disabilitas)" menggunakan teori Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Organisasi.

I.2 Tinjauan Teori

I.2.1. Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik hanya dapat diketahui manfaatnya ketika kebijakan tersebut dilaksanakan. Implementasi merupakan cara agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya. Kebijakan publik adalah rangkaian keputusan yang menyangkut kepentingan publik, yang sadar, terarah, dan

terukur yang dilakukan oleh pemerintah dan melibatkan para pihak berkepentingan (stakeholders) dalam bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sedangkan implementasi kebijakan merupakan tahapan aktivitas, kegiatan, program dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu/pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat atau swasta (Nugroho, 2014: 129). Dalam buku berjudul *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*, Michael Hill dan Peter Hupe (2002) menjelaskan bahwa implementasi berkaitan dengan kebijakan publik (public policy). Kebijakan publik adalah suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai kepentingan umum yang harus ditaati secara bersama-sama (Tahir, 2018). Mengutip Pressman dan Wildavsky disebutkan Implementasi dapat diartikan melaksanakan, mencapai, memenuhi, menghasilkan, menyelesaikan. Secara umum, hal yang mencolok dari definisi kebijakan publik adalah karakter kebijakan publik yang mempunyai tujuan, dan bagaimana kebijakan tersebut diharapkan terkait dengan permasalahan (masyarakat) (Davidovitz et al., 2021).

Lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Van Meter dan Horn (Horn, 1978 : 70) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai "Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions". Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier (Solichin Abdul Wahab, 1997 : 65) menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan sebagaimana berikut : "Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat / dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian."

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan SDGS Dalam Mewujudkan Pendidikan Unklusif di Universitas Hasanuddin (Studi Kasus : Afirmasi Disabilitas)" menggunakan teori Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Organisasi.

I.2.2. Model-Model Implementasi

Peneliti melakukan beberapa tinjauan teori dan mempertimbangkan teori yang mampu mendeskripsikan faktor apa saja yang berperan penting dalam Implementasi kebijakan Afirmasi Disabilitas di Universitas Hasanuddin. Pada dasarnya terdapat berbagai teori dalam implementasi kebijakan. Beberapa teori yang dipertimbangkan dalam konteks ini adalah sebagai berikut:

a. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan (Indiahono, 2009). Beberapa variabel yang terdapat dalam model Van Meter dan Van Horn adalah sebagai berikut:

- a. Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dilaksanakan.
- b. Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standard dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan di awal.
- c. Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah berapa nilai sumber daya (baik finansial maupun manusia) untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik. Evaluasi program/kebijakan seharusnya dapat menjelaskan nilai yang efisien.
- d. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya: seberapa sering rapat rutin akan diadakan, tempat dan waktu. Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program/kebijakan.
- e. Karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.
- f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi itu sendiri.
- g. Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variable penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis,

antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan dapat menjadi bagian dari sikap pelaksana ini

b. Model Rippley dan Franklin

Ripley dan Franklin (1986) memperkenalkan model ini dengan menitikberatkan pada pendekatan kepatuhan implementor secara realistis pada kebijakan yang telah diputuskan. Dalam literatur administrasi publik kepatuhan itu menunjukkan ketaatan dan kedisiplinan anggota atau bawahan terhadap kebijakan yang telah diputuskan. Teori yang digunakan Ripley dan Franklin cenderung ini bersifat topdown yang lebih menekankan pada usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang membuat suatu kebijakan bisa berjalan dengan sukses di lapangan (Abdal, 2015). Kebijakan yang bersifat top down itu identik dengan teori-teori rasional yang lebih menekankan pada intervensi penyelenggara terhadap setiap persoalan publik tanpa ada interaksi bersama dalam membangun consensus (Alaslan, 2021) Lebih lanjut menurut Ripley dan Franklin, keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh tiga factor yaitu:

1. Kepatuhan implementor. Sebagai implementor terhadap kebijakan yang telah diputuskan, kesatuan perintah itu merupakan hal yang harus diperhatikan sehingga kesiapan mental dan sikap sudah harus dipersiapkan untuk mengantisipasi tekanan dan faktor eksternal dan empiris dilapangan.
2. Kelancaran pelaksanaan tugas rutinitas, (functioning routine of problem solver). Setiap implementor harus dapat memastikan bahwa tugas dan fungsi yang dilaksanakan berjalan secara lancar sehingga dapat meminimalisir masalah yang dihadapi.
3. Terwujudnya kinerja yang efektif (the leading of effective performance impact). Setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan selalu bermuara pada peningkatan kinerja yang optimal sehingga dapat memberikan dampak yang baik dalam implementasi kebijakan.

c. Teori Implementasi Kebijakan Menurut Edward III (1980)

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (1980) bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor yaitu komunikasi (communication), Sumber Daya (resources), Disposisi atau sikap pelaksana (disposition or attitudes) dan Struktur Birokrasi (structure bureaucratic)

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor terpenting yang berpengaruh bagi pelaksanaan kebijakan publik dan menentukan keberhasilan

pencapaian tujuannya. Keberhasilan implementasi kebijakan publik tergantung pada pemahaman para pembuat keputusan tentang tugas yang harus dilakukan, yang hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang efektif. Ada tiga penanda yang bisa dipakai untuk menilai keberhasilan variabel komunikasi ini. Secara umum Edwards mengatakan, ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan komunikasi kebijakan yaitu faktor transmisi, konsistensi dan kejelasan (Winarno, 2014: 156). Tiga faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*misscommunication*).
 - b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-levelbureuarats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (*tidak ambigu/mendua*) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implemementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
 - c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.
- b. Sumber daya
- Sumber daya merupakan elemen terpenting dari pelaksanaan kebijakan yang efektif. Berbagai indikator yang dipakai guna mengevaluasi pengaruh sumber daya dalam implementasi kebijakan meliputi:
- a. Sumber Daya Manusia (*Staff*) Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kualitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal maka implementasi tidak akan berjalan dengan baik

- b. Anggaran (Budgetary) Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.
 - c. Fasilitas (Facility) Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Wewenang: pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.
 - d. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
- c. Disposisi atau sikap pelaksana
- Disposisi ini diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para pelaksana dapat mengimplementasikan kebijakan dengan leluasa. Alasannya adalah adanya ketergantungan mereka terhadap superioritas orang-orang yang merumuskan kebijakan. Alasan lainnya adalah karena kompleksnya kebijakan itu sendiri. Bagaimanapun juga cara mana yang dilakukan implementor dalam melakukan kekeluwasaan itu, seberapa besar tergantung pada kecenderungan mereka terhadap suatu kebijakan. Kemudian sikap itu akan dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap suatu kebijakan, dan bagaimana melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasi

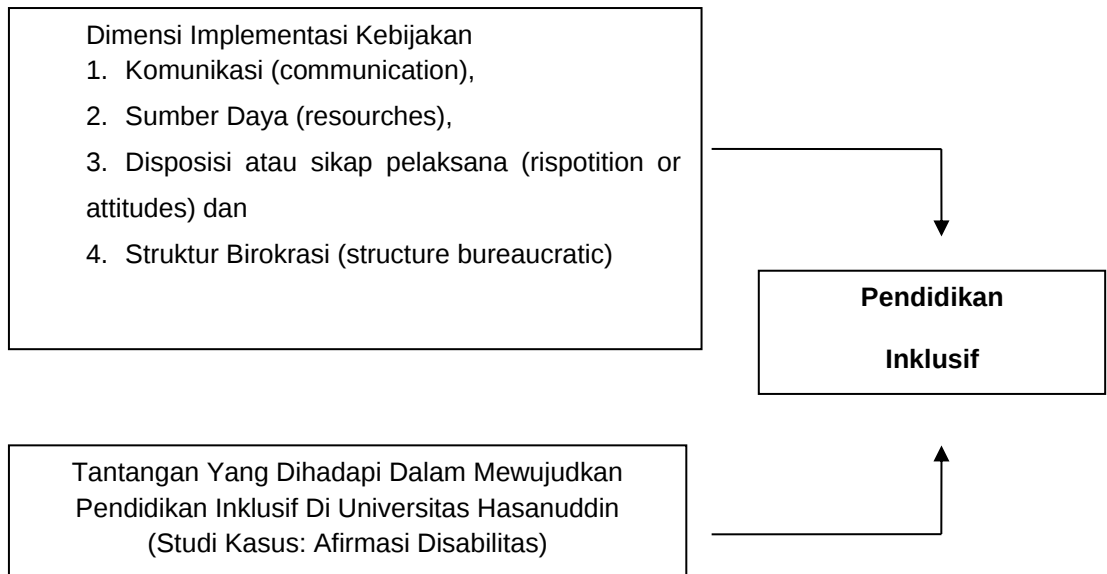
dalam bidang pendidikan yaitu Diknas dan pribadinya (agen implementor).

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi merupakan mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Edward menekankan perlu adanya Standart Operating Procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Edward juga mengingatkan bahwa adakalanya fragmentasi diperlukan manakala implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya

Pada penelitian ini, digunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III yang berfokus pada empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teori ini dipilih karena relevansinya dalam menganalisis keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, khususnya pada tahap implementasi. Edward III memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk mengevaluasi bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan memengaruhi pelaksanaan kebijakan afirmasi disabilitas di Universitas Hasanuddin.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan afirmasi disabilitas di Universitas Hasanuddin dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Secara khusus, penelitian ini berfokus pada SDGs 4 (Pendidikan Berkualitas), yang bertujuan untuk menjamin pendidikan yang inklusif dan merata bagi semua, serta SDGs 10 (Mengurangi Ketimpangan), terutama target 10.2, yang menekankan pemberdayaan dan inklusi sosial, ekonomi, serta politik bagi semua individu, termasuk penyandang disabilitas. Dengan demikian, implementasi kebijakan afirmasi disabilitas di Universitas Hasanuddin tidak hanya mendukung pendidikan inklusif tetapi juga berkontribusi pada pengurangan kesenjangan akses pendidikan bagi kelompok rentan.



Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir
Sumber: Diadopsi dari Edward III (1980)

I.3 Tujuan dan Manfaat penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu menganalisis implementasi kebijakan afirmasi disabilitas di Universitas Hasanuddin dalam rangka mendukung pencapaian tujuan SDGs, khususnya pada pendidikan inklusif (Tujuan 4 SDGs). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi secara teoritis maupun secara praktis, yaitu manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca mengenai implementasi kebijakan afirmasi disabilitas dalam penerimaan mahasiswa baru di Universitas Hasanuddin. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan terkait penerapan pendidikan inklusif di perguruan tinggi sebagai bentuk penguatan prinsip kesetaraan dan aksesibilitas dalam dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:

a. Lembaga Pendidikan Tinggi

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk membantu Universitas Hasanuddin dan perguruan tinggi lainnya dalam memaksimalkan kebijakan afirmasi disabilitas. Hal ini mencakup penyempurnaan proses penerimaan mahasiswa baru, penyediaan fasilitas pendukung, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan inklusif di tingkat perguruan tinggi.

b. Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kebijakan afirmasi disabilitas. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengedukasi masyarakat mengenai hak penyandang disabilitas untuk memperoleh akses pendidikan tinggi yang setara tanpa diskriminasi.

c. Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas topik pendidikan inklusif atau implementasi kebijakan afirmasi disabilitas di perguruan tinggi. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong pengembangan kajian yang lebih luas mengenai efektivitas kebijakan serupa di tingkat nasional maupun internasional.

BAB II

METODE PENELITIAN

II.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Sukardi (2007:162-163) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat dalam bentuk kalimat atau kata-kata. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran atas fenomena yang terjadi sehingga peneliti dapat menguraikan Implementasi Kebijakan SDGS dalam Mewujudkan Pendidikan Inklusif di Universitas Hasanuddin.

II.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisis hasil penelitian lebih terarah. Menurut Moleong (2007), fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif serta membatasi penelitian dengan tujuan untuk memilih data mana yang relevan dan mana yang tidak relevan. Fokus penelitian sangat penting dalam suatu penelitian karena dapat mencegah terjadinya pembahasan yang terlalu luas dan pada akhirnya penelitian yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang menjadi judul penelitian.

Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan SDGS dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Universitas Hasanuddin (Studi Kasus :Afirmasi Disabilitas) yang dilihat melalui empat indikator menurut Edward III, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi yang efektif memungkinkan kebijakan dipahami dengan baik oleh seluruh pihak yang terlibat. Keberhasilan komunikasi dalam implementasi kebijakan dapat diukur melalui:

a. Transmisi

Transmisi dalam implementasi kebijakan afirmasi disabilitas mengacu pada proses penyaluran informasi kebijakan dari pihak universitas kepada kelompok sasaran, yaitu calon mahasiswa disabilitas, tenaga pendidik, dan staf administrasi.

b. Kejelasan

definisi kejelasan dalam implementasi kebijakan afirmasi bagi mahasiswa disabilitas di Universitas Hasanuddin mengacu pada sejauh mana informasi mengenai kebijakan ini disampaikan secara jelas kepada seluruh pemangku kepentingan.

c. Konsistensi

Konsistensi dalam implementasi kebijakan afirmasi disabilitas mengacu pada kesinambungan dan keseragaman penyampaian informasi serta pelaksanaan kebijakan di seluruh unit terkait dalam universitas.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan membutuhkan ketersediaan sumber daya yang memadai, termasuk:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan merujuk pada individu yang bertugas menjalankan kebijakan, termasuk dosen, staf akademik, dan tenaga kependidikan.

b. Anggaran

Anggaran dalam implementasi kebijakan afirmasi disabilitas adalah alokasi dana yang digunakan untuk mendukung fasilitas, layanan, dan program pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

c. Fasilitas

Fasilitas mencakup infrastruktur dan sarana pendukung yang dibutuhkan oleh mahasiswa penyandang disabilitas agar dapat mengakses pendidikan secara setara.

d. Kewenangan

Kewenangan merujuk pada otoritas formal yang diberikan kepada pelaksana kebijakan untuk menjalankan kebijakan tersebut.

3. Disposisi (Sikap dan Komitmen Pelaksana Kebijakan)

Disposisi dalam implementasi kebijakan afirmasi disabilitas mengacu pada sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan, termasuk pimpinan universitas, dosen, staf administrasi, dan tenaga pendidik, dalam menjalankan kebijakan tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan afirmasi disabilitas di Universitas Hasanuddin merujuk pada aturan dan prosedur yang mengatur jalannya kebijakan, termasuk koordinasi antarunit pelaksana. Keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada bagaimana birokrasi mengatur pelaksanaannya, terutama melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) dan koordinasi antarunit terkait.

Tabel II. 1 Fokus Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Kebijakan Publik Oleh Edward III	Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi

	Sumber Daya	1. Sumber Daya Manusia (Staf) 2. Anggaran (Budgetary) 3. Fasilitas 4. Kewenangan
	Disposisi	1. Sikap dan Komitmen Pelaksana Kebijakan
	Struktur Birokrasi	1. Standar Operating Prosedur (SOP) 2. Fragmentasi

II.3 Prosedur Penelitian

II.3.1 Penentuan Informan

Informan dalam penelitian adalah subjek yang memberikan informasi terkait objek yang diteliti. Dalam studi ini, informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tersebut mencakup individu yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai isu yang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Adapun Informan dalam penelitian ini ialah:

1. Wakil Rektor Universitas Hasanuddin
2. Ketua Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin
3. Kasubdit Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Hasanuddin
4. Wakil Dekan 1 Fisip Universitas Hasanuddin
5. Teman – Teman Disabilitas

II.3.1 Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk melaksanakan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan dilaksanakan adalah melalui:

a. Observasi

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi di lingkungan Universitas Hasanuddin dengan mengamati sarana dan prasarana yang dapat mendukung pendidikan inklusif.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan

itu. Maksud diadakannya wawancara seperti yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba antara lain: mengonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan kepedulian, merekonstruksi kebulatan-kebulatan harapan pada masa yang akan mendatang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan oleh peneliti guna mengumpulkan data-data atau dokumen-dokumen yang menunjang terhadap penelitian. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan yaitu berupa foto-foto fasilitas dan sarana yang ada di Universitas Hasanuddin.

d. Studi Dokumen

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data mahasiswa difabel dari Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin

II.3.2 Teknik analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis data kualitatif menggunakan model analisis data menurut Seidel. Menurut Seidel aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh (Moleong 2014:248). Dengan menggunakan analisis data kualitatif diharapkan nantinya dapat membantu peneliti dalam mendeskripsikan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan yaitu pada Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Hasanuddin. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam prosesnya analisis data kualitatif menurut terdiri dari 3 proses yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pengabstraksian, penyederhanaan, dan pengtransformasian data mentah dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari konseptual, permasalahan, pendekatan pengumpulan data yang diperoleh. Misalnya membuat rangkuman, pengkodean, membuat tema-tema, membuat gugus-gugus, dan menulis memo. Reduksi merupakan bagian dari analisis, bukan terpisah, fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan sehingga interpretasi bisa ditarik.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan data pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, dan tabel. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, kajiannya harus tertata secara apik. Penyajian data juga merupakan bagian dari analisis, bahkan mencakup pula reduksi data. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi beberapa kategori atau kelompok. Masing-masing kelompok tersebut menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalahnya. Masing-masing tipologi terdiri atas sub-sub tipologi yang bisa jadi berupa urutan-urutan, atau prioritas kejadian.

3. Menarik Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dan satu konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenarannya dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Dalam tahap ini, peneliti membuat proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokkan data yang telah terbentuk dan proposisi yang telah dirumuskan. Langkahselanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan temuan baru.

II.3.3 Validasi dan Realibilitas Data

4. Validitas Data

Proses pengembangan instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan menguji validitas data. Validitas mengacu pada tingkat ketepatan antara data yang diperoleh dari objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Untuk memastikan akurasi dan keandalan data dalam penelitian terkait implementasi kebijakan SDGs dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Universitas Hasanuddin (Studi Kasus: Afirmasi Disabilitas), peneliti menerapkan metode triangulasi sumber data. Triangulasi ini bertujuan untuk mengatasi potensi penyimpangan dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Dalam menggali kebenaran informasi yang diperoleh, peneliti menggunakan berbagai sumber data berbeda. Selain dari wawancara dengan pemangku kepentingan, data juga diperoleh dari studi pustaka, dokumen resmi universitas, serta kebijakan yang berkaitan dengan afirmasi disabilitas, guna memperkuat dan memvalidasi temuan penelitian.

5. Reliabilitas Data

Reliabilitas data berkaitan dengan tingkat konsistensi dan stabilitas data. Dalam penelitian kualitatif, data dianggap tidak valid jika terdapat perbedaan antara laporan hasil penelitian dengan kenyataan yang terjadi selama penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, reliabilitas diuji dengan memastikan bahwa data yang diperoleh dari berbagai sumber dilaporkan secara sistematis, rinci, dan dapat dipercaya. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan afirmasi disabilitas dalam mendukung pendidikan inklusif di Universitas Hasanuddin.